

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Agama Islam masuk dan berkembang di negeri ini diperkirakan di sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi. Pada abad ini Islam tersebar di sejumlah daerah di Nusantara, terutama daerah pesisir pantai. Hal ini karena Islam banyak disebarkan oleh para pedagang, atau para dai yang merangkap sebagai pedagang. *INIS Newsletter* menerangkan:

*In the 15th century, when the Malacca kingdom became a centre of trading activities in Nusantara, it became a hub of merchants. The Straits of Malacca were visited by these traders as they flied back and forth between India and China. The Arab traders were Moslems, who came with two intentions in mind; to become a successful trader and a successful preacher. They were not interested in political power and they were unarmed.*¹

(Pada abad ke-15, kerajaan Malaka sebuah pusat kegiatan perdagangan di Nusantara, menjadi tempat berkumpulnya para saudagar. Selat Malaka banyak dikunjungi para pedagang yang pulang pergi menjalankan dagangannya antara India dan Cina. Para pedagang Arab itu beragama Islam, yang datang dengan dua tujuan, yaitu menjadi pedagang yang sukses dan juru dakwah yang sukses pula. Mereka tidak tertarik pada kekuatan politik dan mereka tidak bersenjata).²

¹“Da’wa and Kingdom of Malacca”, *INIS News Letter*, Vol IX 1993, (Jakarta: INIS, 1993), p. 10.

²Terjemahan oleh peneliti.

Para pedagang yang datang ke nusantara sambil berdakwah diduga kebanyakan berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka itu bermazhab Syafiiyah dan beraliran Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Karena itu mazahab ini pun berkembang dan menjadi anutan utama mayoritas muslim Indonesia.

Penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan dan kultural berakibat Islam Indonesia tidak ideologis dan politis, dan banyak menyesuaikan dengan kondisi sosial kultural masyarakat. Kehidupan masyarakat muslim di negeri ini cukup moderat dan relatif berbeda dengan Islam yang ada di negeri asalnya, tanah Arab atau Timur Tengah. Moderasi beragama ini terlihat pula dari organisasi-organisasi keislaman yang muncul.

Di awal abad ke-20 muncul sejumlah organisasi keislaman yang dapat disebut sebagai lembaga-lembaga dakwah atau pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut banyak memfokuskan pengadiannya pada bidang dakwah dan pendidikan Islam atau bernuansa Islam. Muhammadiyah misalnya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/Muallimat, Muballighin/Muballighat dan Madrasah Diniyah. Organisasi ini pada mulanya bergerak dan bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat terutama di bidang pendidikan Islam, namun setelah itu organisasi juga bergerak di bidang akidah, dakwah dan sosial.³

³Organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid bertujuan antara lain: Mengembalikan dasar kepercayaan umat kepada kemurnian ajaran islam yang langsung bersumber kepada Al Quran dan Hadis; Menafsirkan ajaran Islam secara modern; Mengamalkan ajaran Islam dalam amal perbuatan yang berguna bagi masyarakat; Memperbaharui system pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan tuntutan zaman. Lihat Yusuf Faisah, *Muhammadiyah Sebuah Gerakan Pembaharuan Islam*, (Yogyakarta: DPP Muhammadiyah, 1999), h. 10.

Organisasi lainnya misalnya Al-Irsyad (1913) mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tajhiziyah, Muallimin dan Takhassus.⁴ Persatuan Tarbiyah Islamiyah. (Perti) mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Awaliyah, Tsanawiyah dan Kuliah Syariah.⁵ Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya. Di samping itu Jamiatul Washliyah (1930) mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul ‘Ali dan Takhassus.⁶

Keberadaan organisasi-organisasi Islam tersebut tidak semata bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga di bidang dakwah, ekonomi, bahkan politik. Al-Jami’at Al-Khairiyah misalnya, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, tidak saja mengembangkan pendidikan agama, tetapi amal usahanya kemudian meluas sampai kepada mengurus dakwah atau penyiaran Islam, perpustakaan dan surat kabar serta membangun perekonomian umat.

Al-Islah Wa al-Irsyad, yang didirikan pada tahun 1914 mendirikan sekolah Al-Irsyad pertama di Jakarta 1015, disusul kemudian oleh beberapa sekolah dan pengajian lain yang sehaluan dengan itu. Gerakan ini membawa kesadaran khususnya di kalangan alim ulama dan golongan Islam umumnya untuk bersatu meningkatkan pendidikan, dakwah dan ekonomi, agar umat Islam Indonesia menjadi kuat.

⁴Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), h. 15.

⁵Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan*, h. 15.

⁶Ahmad Nurhasyim, *Khittah NU dan Pembaharuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), h. 10.

Perserikatan ulama merupakan perwujudan dari gerakan pembaruan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif K.H. Abdul Halim. Pada tahun 1924 perserikatan ulama secara resmi meluaskan daerah operasinya ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 meluas ke seluruh Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan Islam, tetapi juga bergerak di bidang sosial yaitu dengan dibukanya koperasi dan rumah anak yatim.

Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 / 18 Dzulhijah 1330 H, oleh K.H. Ahmad Dahlan bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi dengan tujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih modern.

Nahdlatul Ulama yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H/ 23 Januari 1926 M oleh K.H. Hasyim Asy'ari awalnya berfungsi sebagai perluasan dari suatu Komite Hijaz yang dibangun dengan dua tujuan: (1) Untuk mengimbangi Komite Khilafah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharuan yang berhaluan sekuler di bekas Kekhalifahan Turki Osmani; (2) Untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisional dapat diteruskan.⁷

Persatuan Islam (Persis) yang didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, oleh sekelompok orang yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad

⁷ <http://www.doyseta.co.cc/2010/06/sejarah-pendidikan-islam.html>

Yunus, menitikberatkan pada pembentukan paham keislaman. Salah satu usaha Persis untuk mewujudkan cita-citanya, ialah mendirikan lembaga pendidikan Islam, baik berupa sekolah, kursus, kelompok studi atau diskusi, pengajian dan pesantren. Sekitar tahun 1927, Persis telah mempunyai kelompok diskusi keagamaan yang diikuti oleh anak-anak muda yang telah menjalani masa studinya di sekolah-sekolah menengah pemerintah dan yang ingin memperelajari Islam secara sungguh-sungguh.⁸

Selain itu para ulama yang pulang dari Timur Tengah berperan dalam mengembangkan madrasah di tanah air antara lain Syekh Amrullah Ahmad di Padang (1907), Rangkayo Rahmah el-Yunusiyah di Padang Panjang (1915), Mahmud Yunus di Padang (1930), dan sebagainya.⁹

Sejak awal abad ke-20 sudah bermunculan sejumlah organisasi Islam dengan berbagai visi dan misinya, yang intinya untuk menyatukan dan memajukan umat Islam Indonesia dalam berbagai aspeknya, sekaligus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Muncul dan berkembangnya pendidikan Islam sejak zaman sebelum dan di masa penjajahan Belanda disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) Adanya gerakan pembaharuan dalam Islam yang dilancarkan sejak tahun 1900-an yang dimotori oleh Syekh Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha di Mesir dan

⁸<http://www.doyseta.co.cc/2010/06/sejarah-pendidikan-islam.html>

⁹Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan...*, h. 14. Para ulama tersebut kebanyakan adalah murid ulama terkenal yaitu Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabau, yang menjadi ulama besar di Mekkah. Lihat Akhria Nazwar, *Syekh Ahmad Khatib*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 50 dst. Ahmad Khatib memompa semangat dan menanamkan ilmu agama yang mendalam kepada mereka, sehingga setelah pulang ke tanah air semuanya aktif dalam dunia pendidikan dan pergerakan, karena hal itu dapat dijadikan cara untuk menuju Indonesia merdeka.

berpengaruh ke negara-negara muslim lainnya termasuk Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai protes dan pernyataan sikap atas segala bentuk praktik penyimpangan dalam agama akibat sinkretisme agama. Oleh karenanya gerakan ini memerintahkan kepada umat Islam untuk kembali kepada Alquran dan Hadis dan belajar agama dengan baik. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti madrasah, pondok pesantren dan sebagainya. (2) Munculnya kesadaran secara nasional untuk melawan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Untuk dapat melawan penjajahan maka rakyat harus pandai, dan untuk itu harus sekolah, baik sekolah agama maupun umum. Karena itu diperlukan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. (3) Adanya keinginan yang kuat dari para tokoh pergerakan dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya di bidang sosial ekonomi. Untuk itu masyarakat harus terdidik, termasuk melalui pendidikan madrasah. (4) Adanya semangat untuk melakukan pembaharuan dalam pendidikan Islam. Banyak orang yang tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari agama, maka kemudian muncul madrasah-madrasah dengan sistem klasikal, dengan memperbaharui sistem, metode, dan kurikulum pendidikan Islam. (5) Adanya keinginan masyarakat untuk memperkuat penanaman pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena tidak puas dengan lembaga pendidikan umum yang minim sekali dengan pendidikan agama.¹⁰

¹⁰Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2004), h. 13-14.

Selain itu pendidikan bangsa Indonesia dirasakan masih rendah, bahkan banyak yang buta huruf. Belanda yang saat itu menjajah Indonesia juga tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap pendidikan Islam, bahkan menekan dan memusuhinya karena dicurigai peserta didiknya akan melawan Belanda. Kenyataannya memang demikian, sebab lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang dipimpin oleh para kyai, banyak sekali melahirkan para ulama dan pejuang yang gigih melawan penjajah.¹¹

Lembaga pendidikan Islam kebanyakan berstatus swasta, yaitu didirikan, dikelola, dikembangkan dan didanai oleh masyarakat, dalam bentuk yayasan, organisasi atau perorangan. Ulama, tokoh agama atau organisasi pendirinya sudah berusaha untuk mendirikan, mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam secara mandiri. Hal ini didasari semangat anti penjajahan, serta sikap penjajah sendiri yang memang tidak mau membantu madrasah.¹²

Di masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendells (1811-1816), salah seorang gubernur yang sangat kejam dan banyak menyakiti rakyat Indonesia saat itu pihak penjajah bahkan beranggapan bahwa perhatian terhadap *Mohammedaans Gods Dienst Onderwys* (lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi Islam) seperti madrasah, pondok pesantren, masjid, surau tidak perlu. Alasannya, itu semua hanya merupakan alat meningkatkan iman dan meninggikan akhlak rakyat yang kemudian

¹¹Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 7.

¹²Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 47.

menjadi sumber semangat perjuangan rakyat melawan penjajah. Oleh karena itu diadakan peraturan umum tentang persekolahan (*Staatsblaad* Nomor 4 tahun 1818) yang mengatur pengawasan secara ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi islam. Lembaga-lembaga pendidikan agama dan organisasi Islam dibiarkan hidup sendiri apa adanya tanpa pengakuan dan bantuan dari pemerintah penjajah, kecuali hanya dicurigai dan dikekang dalam bentuk peraturan dan pengawasan yang merugikan.¹³

Kalau pun pemerintah penjajah mau membantu, nilainya sangat kecil. Otto Iskandar Dinata dalam pidatonya di depan Volksraad (1928) menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah Belanda kepada lembaga pendidikan Islam dan organisasi Islam hanya F. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus gulden). Hal itu merupakan hinaan, karena bantuan itu seharusnya diberikan sebesar F.1.000.000, mengingat lembaga pendidikan dan organisasi Islam menyangkut keperluan 50 juta penduduk Indonesia saat itu.¹⁴

Setelah Indonesia merdeka baru kemudian ada perhatian dari pemerintah. Di antaranya, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi Islam tidak lagi dicurigai, melainkan dibantu agar lebih berkembang. Bantuan tidak saja berupa dana dan peralatan agar dapat berkembang dengan baik, tetapi juga berupa payung hukum agar keberadaan lembaga pendidikan dan organisasi Islam eksis di tengah masyarakat.

¹³Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Ahama Islam, 1998/1999), h. 3.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Manajemen...*, h. 4.

Di pertengahan tahun 1970-an pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu SK Menteri Agama Nomor 6 tahun 1975, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37/U/1975 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1975 tertanggal 24 Maret 1975 tentang Perubahan Kurikulum Madrasah. Dengan adanya perubahan ini, maka kedudukan madrasah setara/ sederajat dengan sekolah umum, dalam arti Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP dan Madrasah Aliyah (MA) sederajat dengan SMA. Lulusannya boleh melanjutkan ke sekolah lain yang berbeda, misalnya lulusan SMP boleh melanjutkan ke MA, atau sebaliknya lulusan MTs boleh melanjutkan ke SMA atau sebaliknya..

Sewaktu Abdul Mukti Ali menjadi Menteri Agama, ia memasukkan mata pelajaran-mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Berbagai mata pelajaran dan keterampilan menjadi bagian dalam kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Pelajaran dan keterampilan umum itu sebenarnya telah lama diberikan di sekolah-sekolah agama, tetapi belum dimasukkan ke dalam kurikulum, maka di era Mukti Ali dimasukkan ke dalam kurikulum, terutama pada madrasah-madrasah negeri. Pada madrasah swasta hal itu juga diberikan tetapi kurang sistematis. Dengan diberikannya pelajaran umum dan keterampilan pada madrasah-madrasah, maka para siswanya dapat mengikuti perkembangan dunia modern, sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan yang di era Presiden Soeharto sangat digalakkan..

Tetapi kebijakan Mukti Ali juga dipertanyakan oleh sebagian kalangan muslim, sebab pemberian pelajaran umum dan keterampilan dikhawatirkan

mengurangi porsi untuk pelajaran agama. Lulusannya dikhawatirkan menjadi orang yang serba tanggung, tidak menguasai ilmu agama secara mendalam, dan juga tidak menguasai pengetahuan umum dan keterampilan secara profesional. Tetapi pemerintah tetap bersikukuh bahwa pendidikan umum dan keterampilan tetap harus diberikan di sekolah-sekolah agama. Sebaliknya, pendidikan agama juga harus diberikan pada sekolah-sekolah umum, sehingga kedua jenis pendidikan tersebut menjadi sederajat. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973 – 1978 dan 1983 menegaskan bahwa pendidikan Agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat (jenjang) pendidikan.¹⁵

Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kemudian disempurnakan lagi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) juga memosisikan kedudukan Madrasah setara atau sama dengan sekolah umum, sehingga Madrasah dapat dikatakan merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam. Madrasah Tsanawiyah yang kedudukan dan *out put*-nya sama dengan sekolah menengah umum tingkat pertama (SMP), ikut melaksanakan ujian nasional dengan konsekuensi pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum harus diperbanyak.

Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menguatkan posisi pendidikan agama, baik pada sekolah agama maupun sekolah umum. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2007 tentang

¹⁵<http://www.doyseta.co.cc/2010/06/sejarah-pendidikan-islam.html>

Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pasal 3 ayat (1) PP ini menyatakan, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (PP LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di dalam NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui *Nadlatut Tujjar* (1918), disusul dengan *Tashwirul Afkar* (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga *Nahdlatul Wathan* (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan keilmuan, sosial, budaya; dan (3) wawasan kebangsaan.¹⁶

Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial-keagamaan dan pendidikan untuk memberdayakan dan mencerdaskan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita NU; dan lahirlah lembaga-lembaga dan lajnah seperti Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan Ma'arif, Lembaga Sosial Mabarroth, Lembaga Pengembangan

¹⁶<http://LPP Maarif NU>, diakses tanggal 1 Desember 2011.

Pertanian, dan lain sebagainya--, yang berfungsi menjalankan program-program NU di semua lini dan sendi kehidupan masyarakat. Gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pendiri (*the founding fathers*) NU kemudian dijalankan melalui lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU). Lembaga ini bersama-sama dengan jam'iyah NU secara keseluruhan melakukan strategi-strategi yang dianggap mampu meng-cover program-program pendidikan yang dicita-citakan NU.¹⁷

Secara keseluruhan dalam skop nasional jumlah lembaga pendidikan yang berada di lingkungan LP Maarif NU cukup banyak. Perinciannya, madrasah ibtidaiyah 7.452 buah, madrasah tsanawiyah 2.991 buah, aliyah 1.002 buah, sekolah dasar 80 buah, sekolah menengah pertama 278 buah, sekolah menengah atas 71 buah, sekolah menengah kejuruan 137 buah dan perguruan tinggi 81 buah. Jumlah semuanya 12.094 buah.¹⁸

Agar semua lembaga pendidikan yang berada dalam naungan LP Maarif NU dapat menjalankan pendidikannya sesuai dengan arah kebijakan NU, maka sekolah/madrasah tersebut sudah mempunyai standar kompetensi bidang studi Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) yang berlaku untuk lingkup untuk pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Namun masing-masing wilayah juga diberi

¹⁷ [http:// LPP Maarif NU](http://LPP Maarif NU), diakses tanggal 1 Desember 2011.

¹⁸ *Maarif NU Online*, diakses tanggal 2 Desember 2011.

kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan doktrin Aswaja tersebut.¹⁹

Di masa lalu, di Kalimantan Selatan Jamiyah NU pernah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini antara lain ditandai oleh adanya sejumlah lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh NU. Di tahun 1935, Kalimantan Selatan pernah menjadi tuan rumah Mukhtamar NU yang bersifat nasional. Meskipun telah mengalami pasang surut, hingga sekarang masih terdapat sejumlah madrasah yang dikelola oleh NU, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah hingga aliyah.

Sesuai dengan sifat Jamiyah NU yang berpaham Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, maka lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya pun diupayakan untuk menganut paham yang sama. Untuk itu selain mata pelajaran wajib dan muatan lokal sebagaimana diatur oleh pemerintah, juga ada mata pelajaran ke-NU-an, dengan harapan para siswa tetap berpaham Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah.

Namun seiring dengan dinamika atau perkembangan zaman, upaya untuk menerapkan sistem pendidikan yang kental dengan corak NU tidaklah mudah. Hal ini seiring dengan meredupnya perkembangan NU itu sendiri, khususnya di Kalimantan Selatan. Kebanyakan orang tua dan siswa tidaklah lagi fanatik dengan organisasinya.

Menghadapi kenyataan dan kecenderungan demikian, para tokoh NU di daerah berusaha untuk menyesuaikan diri. Untuk menarik minat siswa dari kalangan

¹⁹ *Maarif NU Online*, diakses tanggal 2 Desember 2011.

masyarakat pada umumnya, ciri khas NU pun tidak lagi terlalu ditonjolkan, bahkan banyak madrasah/sekolah yang tidak diberi label NU atau Maarif NU. Meskipun demikian, dalam pembelajaran selain pembelajaran dan pendidikan agama Islam, tetap diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ke-NU-an, baik pada tataran akidah, syariah maupun tasawuf. Dalam tataran akidah, misalnya masih diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Dalam tataran syariah dan ibadah masih dianut sistem peribadahan dan hukum yang mengacu kepada mazhab Syafii, dan dalam tataran akhlak/tasawuf masih diajarkan tasawuf-tasawuf amali/akhlaqi yang mengacu kepada pendapat para ulama Syafiiyah, seperti Imam al-Ghazali dan para ulama sufi dan ahli tarekat.

Begitu juga dalam pembelajaran kewarganegaraan, ditekankan bahwa Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sudah merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh NU di dalamnya seperti KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim.

Para tokoh dan ulama NU setempat juga merespon positif pembaruan pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu dengan masuknya pelajaran umum dan keterampilan dalam pembelajaran agama secara terintegrasi, baik dengan atau tanpa penegerian terhadap sekolah/madrasah NU yang sebelumnya semua berstatus swasta. Untuk itu ada sejumlah pesantren NU yang membuka madrasah dan sekolah umum yang melaksanakan ujian nasional. Dengan kata lain terjadi banyak penyesuaian dalam sistem pendidikan, baik dalam tataran konsep pemikiran, kebijakan maupun dalam implementasinya.

Meskipun demikian, tidak semua madrasah/sekolah NU bersedia melakukan pembaruan tersebut. Sebagian tetap bertahan dengan sistem pendidikan klasik-tradisional, yaitu hanya memberikan pelajaran agama, minus pelajaran umum. Alasannya karena mereka ingin melahirkan para ulama yang mampu membaca kitab-kitab kuning dan menguasai ilmu-ilmu keislaman lainnya, yang mana tujuan ini dikhawatirkan akan sulit dicapai jika dicampuri dengan keharusan mempelajari ilmu pengetahuan umum.

Di Kota Banjarmasin terdapat beberapa lembaga pendidikan NU yang masih eksis hingga sekarang dan menggunakan label NU, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah NU Nurul Islam yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani km 5 Banjarmasin. Dahulunya di lokasi ini juga ada SMA NU Realita, namun sudah bubar, dan yang bertahan adalah MI dan MTs NU Nurul Islam. Kemudian ada SMP dan SMK NU yang berlokasi di Jl Rantau Timur II Kelayan Luar, kedua sekolah umum ini cukup berkembang dengan baik. Sebelumnya juga ada SMP Sahabat di Kebun Bunga, MTs Normal Islam di Karang Paci yang juga menggunakan label NU, namun sekarang sudah bubar. Beberapa yang lainnya asal muasalanya memang milik NU, tetapi kemudian tidak lagi menggunakan label NU.

Adanya sekolah/madrasah NU yang bubar menunjukkan tidak mudahnya bagi NU dalam mengembangkan lembaga pendidikan, dan adanya sekolah/madrasah yang masih berdiri hingga sekarang menunjukkan bahwa sekolah/madrasah tersebut mampu bertahan dan melalui dinamikanya dengan selamat, tentu dengan melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan tuntutan

zaman. Sebagai contoh SMK NU dikembangkan karena minat masyarakat memasukinya cukup tinggi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga kerja terampil, sementara pemerintah juga proaktif mendirikan SMKN dan demikian juga dengan organisasi lainnya. Namun SMK NU lebih berbasis agama (beraliran NU), sehingga memiliki corak tersendiri yang mungkin tidak sama dengan SMK lainnya.

Dinamika ini menurut peneliti penting untuk diteliti lebih jauh. Atas dasar ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "DINAMIKA PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA DI KOTA BANJARMASIN.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok penelitian ini adalah "bagaimana dinamika pendidikan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin?, yang mencakup:

1. Bagaimana kepemimpinan pengelolaannya?
2. Bagaimana perkembangan kurikulumnya?
3. Bagaimana model pembelajarannya?
4. Bagaimana tenaga pendidiknya?
5. Bagaimana pendanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pendidikan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin, yang mencakup kepemimpinan, perkembangan kurikulumnya, model pembelajarannya, ketenagaan pendidikan dan pendanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan revitalisasi, restrukturisasi dan rekonstruksi sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh NU, baik di pusat maupun di daerah, agar sejalan dengan dinamika zaman.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna mengatasi masalah yang dihadapi oleh NU, mengotimalkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan kontribusi warga Nahdliyin untuk memajukan pendidikan di lingkungan NU sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian ini maka ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Dinamika pendidikan, maksudnya adalah perkembangan dan pasang surut lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh orang NU, baik dari segi kepemimpinan pengelolaannya, perkembangan kurikulumnya, model pembelajarannya, tenaga pendidik dan pendanaan.
2. Pendidikan NU, maksudnya adalah lembaga pendidikan NU berupa sekolah dan madrasah yang masih eksis. Berupa madrasah diwakili Madrasah

Ibtidaiyah dan MTs NU Nurul Islam dan berupa sekolah adalah SMP dan SMK NU Banjarmasin. Sedangkan lembaga pendidikan NU berupa TK/Raudhatul Athfal dan pondok pesantren tidak diteliti.

3. NU, adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, di dalamnya ada tokoh atau pengurus NU yang mendirikan, melaksanakan dan mengelola lembaga pendidikan dengan menggunakan nama atau label NU.

E. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian terdahulu yang sama dengan yang akan diteliti ini. Namun ada penelitian yang mengandung kemiripan, yaitu:

1. Penelitian tesis Rusdiansyah (2009) berjudul: *"Peranan Muhammadiyah dalam Mengembangkan Pendidikan dan Kehidupan Sosial Keagamaan di Kota Banjarmasin*. Penelitian ini memfokuskan kajian pada peranan organisasi Muhammadiyah dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan, sejak 1957 Muhammadiyah di Kota Banjarmasin sudah aktif dalam memajukan pendidikan umum dan kejuruan, mulai dari SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan dalam 10 tahun terakhir sudah ada perguruan tinggi yaitu Akademi Perawat Muhammadiyah dan juga STIKES Muhammadiyah. Selain itu Muhammadiyah juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti penyediaan jasa poliklinik, rumah sakit, ambulance, alkah pekuburan, dll. Muhammadiyah setempat kurang berperan

dalam pengembangan lembaga pendidikan agama seperti MI, MTs dan MA, namun sebagai gantinya di sekolah-sekolah umum yang dikelola Muhammadiyah diberikan pendidikan agama yang lebih banyak dibanding pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

2. Penelitian Hasbi Indra, *Pesantren Asy-Syafiiyah Jakarta dalam Transformasi Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pena Madani, 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Asy-Syafiiyah yang didirikan oleh KH Abdullah Syafi'i merupakan pesantren bercorak NU yang berjasa besar dalam menanamkan paham NU di kalangan santri dan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
3. Penelitian Birhasani (2009), berjudul: "*Kontribusi NU dalam Pembinaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU Kota Banjarmasin cukup proaktif dalam mengembangkan pendidikan Islam secara nonformal, khususnya untuk kalangan Nahdliyin dewasa dan orang tua melalui pengajian, majelis zikir dan tarekat. NU setempat masih mengalami hambatan di segi manajemen organisasi, sehingga organisasi kurang berjalan sebagaimana mestinya, di mana walaupun warga NU sangat banyak tetapi yang mengurus NU hanya sedikit, gedungnya tidak representatif (sudah tua) dan NU nyaris tidak memiliki dana organisasi. Setiap kali kegiatan dana diupayakan secara spontan karena tidak adanya kas atau dana abadi.

Dengan demikian penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, sebab penelitian ini difokuskan pada dinamika lembaga pendidikan di lingkungan NU khususnya di Kota Banjarmasin.